

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan mamur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan dirinya dari segala aspek, baik jasmaniah maupun rohaniah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas dan jelas sebagai berikut.

1. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945; alenia 4).
2. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (Batang Tubuh UUD 1945; Pasal 31, ayat 1 dan 2).

Sedangkan pendidikan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara RI (1999-2004) adalah sebagai berikut.

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal.

3. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat.
4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan tersebut, diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehubungan dengan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ditambah dengan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Bab I, Pasal 1, ayat 1).
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Bab I, Pasal 1, ayat 10).
3. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. (Bab VI, Pasal 13 ayat 1)
4. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Bab VI, Pasal 26 ayat 2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah menyatakan bahwa ; Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak ; Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah; Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya (Bab I, Pasal 1, ayat 1, 2, dan 3).

Tujuan pendidikan luar sekolah adalah : (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi; (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (Bab II, Pasal 2, ayat 1, 2, dan 3).

Sedangkan peraturan pemerintah yang mendukung pendidikan luar sekolah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71. Tahun 1991 tentang Latihan Kerja. Latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.

Visi pendidikan luar sekolah adalah terwujudnya masyarakat gemar belajar, bekerja, berusaha dan berolahraga, sehingga tercipta masyarakat yang mandiri, sehat berahlak mulia, mandiri serta mampu beradaptasi dengan perubahan lokal dan global (Ditjen PLSP, 2001:12).

Sedangkan dua dari delapan “Misi” pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat dan pasar.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan baik yang berupa kursus maupun pendidikan keterampilan bermata pencaharian, apakah itu terkait dengan berbagai kebutuhan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program pembangunan nasional PLS dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2000-2004). Dua dari enam tujuan program pembangunan nasional PLS adalah sebagai berikut.

Pertama, memperluas, pemeratakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan keterampilan bagi perempuan termasuk remaja, keluarga dan orangtua, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (miskin ilmu dan miskin ekonomi) sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan. *Kedua*, memperluas, pemeratakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah utamanya warga masyarakat yang tergolong miskin dan menganggur, dan/atau bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Sasaran program pembangunan pendidikan luar sekolah adalah masyarakat yang oleh karena berbagai hal tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan melalui jalur sekolah. Secara spesifik satu dari empat sasaran program-program pendidikan luar sekolah (sasaran ke 4) adalah: Penduduk yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kegiatan pokok program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan PLS adalah sebagai berikut. Program Pendidikan Berkelanjutan, yang terdiri dari: 1) program yang berorientasi pada pemberian bekal pengembangan diri dan profesionalisme melalui kursus yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar, seperti: jasa, bahasa, pertanian, kerumahtanggaan, kesehatan, teknik dan perambahan, olahraga kesenian, kerajinan dan industri, serta keterampilan khusus; 2) program yang berorientasi pada pemberian bekal untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup melalui program Kejar Usaha, Magang, Beasiswa/Kursus (Renstra PLSP, 2000-2004).

Rencana strategis pembangunan yang akan ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, (1) perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan, melalui program Pembinaan Kursus, Kelompok Belajar Usaha, Magang, Beasiswa/Kursus, dengan jangkauan sampai akhir tahun 2004, sebagai berikut; Program Kelompok Belajar Usaha, Beasiswa/Magang, sekurang-kurangnya menjangkau 50 % dari total sasaran 16.052.893 penduduk usia 17 - 30 tahun yang tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak kursus (BPS, 2000 dan UNIFEM, 2000). *Kedua*, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, program-program pendidikan luar sekolah akan lebih diorientasikan pada kebutuhan pasar tanpa mengesampingkan aspek akademis. Karenanya lulusan program pendidikan luar sekolah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar kerja serta peluang usaha.

Masalah yang dihadapi pendidikan luar sekolah selama ini adalah pelaksanaan pembelajaran selama ini belum mengoptimalkan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan belum dapat berpartisipasi atau terjun langsung ke lapangan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Tenaga kependidikan PLSP lebih banyak

duduk di belakang meja. sehingga hasilnya warga belajar belum mampu menerapkan apa yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

Menurut Ditjen PLSP (2001) masalah pendidikan luar sekolah *pertama*, pendidikan luar sekolah belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan seperti pada pendidikan sekolah terutama dari pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, baik yang berkenaan dengan kebijakan maupun dukungan anggaran. Sebagai konsekuensinya pemerataan kesempatan dan pelayanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal. *Kedua*, belum optimalnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada jajaran pendidikan luar sekolah dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga layanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal. *Ketiga*, belum optimalnya prasarana dan sarana baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan luar sekolah.

Berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi pendidikan luar sekolah tersebut di atas, maka tantangan pendidikan luar sekolah kedepan adalah :

1. *Perluasan dan Pemerataan;*

Pemerataan memperoleh pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah masih masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 210 juta, masih terdapat:

- a. kurang lebih 11 juta (39,29) anak usia 0 s.d. 6 tahun belum tersentuh oleh pendidikan prasekolah apapun;
- b. kurang lebih 3,9 juta anak usia 7 s.d.15 tahun (10,16%) dari jumlah penduduk usia 7 s.d. 15 tahun yang mencapai 38,39 juta) belum terlayani oleh pendidikan sekolah;
- c. kurang lebih 16 juta penduduk usia 16 s.d. 29 tahun dalam kondisi tidak bersekolah, tidak kursus dan atau tidak bekerja;

d. kurang lebih 5,2 juta penduduk usia 10 s.d. 44 tahun yang buta aksara dari 16 juta penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas (Balitbang Diknas, 2000).

Selain itu lulusan tingkat pertama dan menengah banyak yang menjadi pengangguran. Berdasarkan data Balitbang Diknas (2000) diketahui terdapat 19,3% tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP, 34,4 % lulusan SLTP tidak melanjutkan ke sekolah menengah, dan 53,12% tamatan SLTA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga jumlah pengangguran telah mencapai 40 juta orang.

Pembelajaran selama ini cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan tidak terkait dengan lingkungan dimana warga belajar berada. Akibatnya warga belajar tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari lingkungannya, sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri.

Oleh karena itu kaitannya dengan meningkatkan perluasan dan pemerataan, adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terutama, pendidikan berkelanjutan, pendidikan perempuan dan dukungan terhadap pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih meluas dan merata sehingga lebih mampu menampung dan menjangkau warga masyarakat lebih banyak dari yang selama ini telah dijangkau.

2. Mutu dan relevansi

Tuntutan pembangunan nasional kedepan menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Terutama menghadapi era globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi daerah, kebutuhan akan SDM yang berkualitas semakin diperlukan dan sangat mendesak.

Pada saat ini mutu SDM kita jauh tertinggal dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga yang beberapa tahun yang lalu berada di bawah peringkat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Indonesia (IPM). Dilaporkan bahwa pada tahun

2001 HDI atau IPM Indonesia hanya menempati peringkat 102 dari 174 negara dan masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga (Balitbang Diknas, 2000).

Dalam kaitannya dengan mutu dan relevansi, adalah bagaimana pendidikan di sekolah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan dapat memenuhi pendidikan selanjutnya serta menciptakan dan memenuhi lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Penataan Sistem Manajemen

Kaitannya dengan penataan sistem manajemen pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PLS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pembiayaannya sehingga pelembagaan penyelenggaraan PLS yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat mengakar pada mekanisme perkembangan lingkungan masyarakat Direktorat Jenderal PLSP (2001: 2).

Sejak berlangsungnya otonomi daerah telah terjadi perubahan secara mendasar berkaitan dengan eksistensi institusi, struktur organisasi, kepegawaian, penganggaran dan penyelenggaraan unit pelaksana teknis dan instansi vertikal. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan di era otonomi dan globalisasi, perlu diupayakan pembaharuan dan pengembangan program pendidikan luar sekolah yang lebih mengacu pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas terampil, mandiri dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.. Upaya tersebut dilaksanakan dengan meletakkan pendidikan luar sekolah pada satu sistem yang menuntut keterlibatan masyarakat sebagai perancang, pelaksana, pemakai dan sekaligus keluaran dari berbagai program pendidikan luar sekolah.



Berdasarkan PP No. 25/2000, kewenangan pemerintah pusat adalah pembuatan kebijakan strategis yang berskala nasional dan internasional. Konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah adalah bahwa peran, perilaku dan kewenangan pemerintah pusat khususnya di bidang pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah akan berkurang, dan sebaliknya tanggung jawab yang lebih besar akan beralih ke pemerintah daerah. Paradigma pembangunan di bidang pendidikan perlu direposisi dari paradigma lama yang sentralistik ke paradigma baru yang lebih bersifat desentralistik yang bercirikan pada pemberdayaan potensi daerah dan masyarakat (*paradigma pemberdayaan*).

Dalam paradigma pemberdayaan pendekatan yang lebih bersifat partisipatif dengan memperhatikan keberadaan masyarakat dan potensi lokal yang realistis perlu diutamakan. Untuk itu peran pemerintah pusat dan daerah haruslah difungsikan sebagai pihak yang memfasilitasi dan mengkatalisasi serta memberikan dukungan terhadap aktor utama yakni masyarakat itu sendiri untuk mengatasi masalah-masalahnya secara mandiri.

Paradigma diatas mensyaratkan orientasi pembelajaran yang lebih bersifat fungsional, artinya orientasi pembelajaran yang lekat dengan kondisi dan kehidupan nyata masyarakat dengan berbagai ragam kehidupannya. Oleh karena itu empat pilar pendidikan yang sudah dibakukan UNESCO yakni *learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together* sangat relevan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran masyarakat dalam rangka pendidikan untuk semua.

Peningkatan mutu yang selama ini dilakukan belum mampu memecahkan masalah dasar pendidikan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis. Untuk maksud tersebut, pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (*humanisasi*).

Pendidikan juga harus dapat mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani menghadapi problema tanpa rasa tertekan; mau, mampu dan senang meningkatkan



fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan juga diharapkan mampu membekali peserta didik untuk memelihara diri sendiri, meningkatkan hubungan dengan Tuhan Maha Esa, masyarakat dan lingkungannya. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sekarang diperlukan pendidikan yang dengan sengaja dirancang untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup dan kehidupan, yang secara integratif memadukan potensi generik dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi problema kehidupan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Departemen Pendidikan Nasional membuat suatu konsep "Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup dengan Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas". Dengan bekal kecakapan hidup diharapkan para lulusan dapat mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan pembelajaran selama ini belum mengoptimalkan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan belum dapat berpartisipasi atau terjun langsung ke lapangan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Tenaga kependidikan PLSP lebih banyak duduk di belakang meja, sehingga hasilnya warga belajar belum mampu menerapkan apa yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan program yang dapat melibatkan tenaga kependidikan dan peserta didik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, yaitu melalui pengembangan pembelajaran partisipatif pada pendidikan kecakapan hidup. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa keberhasilan pelaksanaan dalam pendidikan kecakapan hidup sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan, sehingga memberikan landasan berfikir

bahwa strategi dan metode pembelajaran berpengaruh dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pada pendidikan kecakapan hidup.

Masalah yang dihadapi pendidikan luar sekolah berdasarkan Rencana Strategi Ditjen PLSP tahun 2000-2004 antara lain : *pertama*, selama ini pendidikan luar sekolah belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan seperti pada pendidikan sekolah terutama dari pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, baik yang berkenaan dengan kebijakan maupun dukungan anggaran. Sebagai konsekuensinya pemerataan kesempatan dan pelayanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal. *Kedua*, belum optimalnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada jajaran pendidikan luar sekolah dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga layanan pendidikan luar sekolah terhadap masyarakat belum optimal. *Ketiga*, belum optimalnya prasarana dan sarana baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan luar sekolah. Kondisi tersebut merupakan penghambat terhadap upaya peningkatan mutu dan perluasan layanan pendidikan luar sekolah (Ditjen PLSP 2001: 2).

Tantangan pendidikan luar sekolah kedepan adalah :

1. Perluasan dan Pemerataan;

Pemerataan memperoleh pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah masih harus terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 210 juta, masih terdapat kurang lebih 16 juta penduduk usia 16 s.d. 29 tahun dalam kondisi tidak bersekolah, tidak kursus dan atau tidak bekerja (Balitbang Depdiknas tahun 2000).

Oleh karena itu kaitannya dengan meningkatkan perluasan dan pemerataan, adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan luar sekolah terutama, pendidikan berkelanjutan, pendidikan perempuan dapat dilakukan secara lebih meluas dan merata sehingga lebih

mampu menampung dan menjangkau warga masyarakat lebih banyak dari yang selama ini telah dijangkau (Ditjen PLSP 2001:3).

2. Mutu dan relevansi

Tuntutan pembangunan nasional kedepan menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Terutama menghadapi era globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi daerah, kebutuhan akan SDM yang berkualitas semakin diperlukan dan sangat mendesak.

Data Balitbang Depdiknas tahun 2000, menunjukkan anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 1,42 juta orang (APM SD/MI sebanyak 94,5%), dan anak usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 5,8 juta orang (APM SLTP/MTs sebanyak 55,7%). Dengan demikian sebanyak 7,22 juta anak usia wajib belajar di Indonesia belum memiliki kesempatan untuk belajar. Selain itu data kohort yang disusun sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan bahwa siswa SD yang berjumlah 4,98 juta orang yang meneruskan ke SLTP hanya 64,5 %, yang yang melanjutkan ke SMU/SMK sebanyak 36,7% dan siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 14,4 %. Selain permasalahan pendidikan tersebut berdasarkan susenas BPS tahun 2000, menunjukkan bahwa pencari kerja 3,9 juta orang, penduduk miskin sebanyak 37,5 juta orang. Sedangkan tenaga kerja pendidikan SD ke bawah sebanyak 63,5%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan betapa banyaknya generasi muda Indonesia yang berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan yang dapat mereka andalkan untuk menghadapi masa depan mereka. Berdasarkan fakta pendidikan tersebut diperlukan suatu upaya sistematis, menyeluruh dan saling melengkapi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada saat ini.

Dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup generasi muda, maka Ditjen PLSP memprogramkan pendidikan kecakapan hidup, dengan tujuan agar warga belajar memiliki kecakapan personal, social, dan akademik.

Partisipasi tenaga kependidikan dan warga belajar di lapangan belum optimal, karena kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kecakapan hidup warga belajar dan pendidik harus terlibat dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Strategi dan metode yang cocok untuk melibatkan peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian adalah dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran partisipatif. Dengan adanya pemfokusan masalah tersebut, ini diharapkan akan lebih mendalam dan menyeluruh sehingga diperoleh gambaran nyata dan menyeluruh tentang penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup. Oleh karena itu untuk mengetahui proses pembelajaran partisipatif pada pendidikan kecakapan hidup, maka dilakukan penelitian tentang “Penerapan Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Kecakapan Hidup pada Kelompok Tani Giri Saluyu Kp. Langensari Rt. 04 Rw. 02 Desa Langensari, Kec. Lembang, Kab. Bandung.

C. Perumusan Masalah

Pelaksanaan pembelajaran selama ini belum mengoptimalkan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan belum dapat berpartisipasi atau terjun langsung ke lapangan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Tenaga kependidikan PLSP lebih banyak duduk di belakang meja. Dengan demikian pembelajaran yang dilaksanakan tidak berdasarkan kebutuhan warga belajar dan kurang melibatkan warga belajar dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Hasilnya warga belajar belum mampu menerapkan apa yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guna memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan program pembelajaran yang partisipatif, yaitu melalui pengembangan pembelajaran

partisipatif pada pendidikan kecakapan hidup. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa keberhasilan pelaksanaan dalam pendidikan kecakapan hidup sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan, sehingga memberikan landasan berfikir bahwa strategi dan metode pembelajaran berpengaruh dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pada pendidikan kecakapan hidup.

Oleh karena itu agar tenaga kependidikan dan warga belajar terlibat dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian maka pendekatan yang cocok untuk pembelajaran adalah menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup pada Kelompok Tani Giri Saluyu di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung”. Pengkajian selanjutnya lebih diarahkan pada fokus masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup ?
3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup?
4. Bagaimanakah hasil dan dampak pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup ?

D. Definisi Operasional

Penerapan adalah berkenaan dengan perihal mempraktekkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:374). *Penerapan* dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran partisipatif pada dalam pendidikan kecakapan hidup Kelompok Tani Giri Saluyu Desa Langensari.

Pembelajaran adalah upaya yang sistematis dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar, (Djudju Sudjana, 2000). *Pembelajaran* dalam penelitian ini adalah upaya sistematis dan disengaja oleh pendidik dalam menciptakan kondisi belajar, sehingga warga belajar mempelajari pengetahuan, sikap dan keterampilan. usaha budidaya stroberi dalam wadah Kelompok Tani Giri Saluyu.

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 737). Sedangkan menurut (Djudju Sudjana, 2000) *partisipatif* adalah terlibatnya warga belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipatif dalam penelitian ini adalah terlibatnya warga belajar, nara sumber teknis dan pendamping mulai dari identifikasi kebutuhan belajar, penentuan tujuan, jenis usaha, waktu, tempat pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup usaha budidaya tanaman stroberi.

Pembelajaran Partisipatif adalah upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran (Djudju Sudjana, 2000; 28). *Pembelajaran partisipatif* dalam penelitian ini adalah terlibatnya warga belajar Kelompok Tani Giri Saluyu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup dimana warga belajar sebagai subjek dan tenaga kependidikan sebagai pendamping.

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Djudju Sudjana, 2000;61). *Perencanaan Pembelajaran Partisipatif*, menurut Djudju Sudjana, (2000; 28) adalah kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga belajar dalam kegiatan merencanakan pembelajaran. *Perencanaan Pembelajaran Partisipatif*, dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga belajar dalam menyatakan kebutuhan belajar, sumber belajar, kemungkinan hambatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan pembelajaran, waktu, tempat pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran.

Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif, menurut Djudju Sudjana, (2000; 28) adalah kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga belajar dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Keikutsertaan warga belajar dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran (Djudju Sudjana, 2000; 69) *Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif* dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga belajar dalam menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, membina dan mengembangkan kegiatan pembelajaran, aktif dalam proses pembelajaran baik mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban, mengemukakan masalah atau pemecahan masalah, menyampaikan ide atau gagasan serta masukan atau temuannya, melaksanakan ujicoba atau praktek, dan saling membelajarkan, bertukar pengalaman antar warga belajar baik secara perorangan atau dalam kelompok.

Penilaian adalah merupakan pengumpulan data secara sistematis guna mengambil keputusan (Suharsimi Arikunto, 1988:4). Sedangkan menurut (Djudju Sudjana, 2000;269) penilaian adalah kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. *Penilaian Pembelajaran Partisipatif*, menurut Djudju Sudjana, (2000; 28) adalah kegiatan membelajarkan dan kegiatan belajar dimana terjadi keikutsertaan warga

belajar dalam kegiatan penilaian pembelajaran. Terlibatnya peserta didik dalam penilaian program kegiatan pembelajaran (Djudju Sudjana, 2000; 70). *Penilaian Pembelajaran Partisipatif* dalam penelitian ini adalah keikutsertaan warga belajar dalam menilai proses kegiatan, hasil dan pengaruh pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui evaluasi diri dengan cara menyatakan kemampuan yang telah dimilikinya, mempraktekan hasil pembelajaran, dan melakukan pengamatan dari hasil pembelajaran teori dan praktek, baik hasil dirinya ataupun hasil orang lain.

Hasil atau keluaran, adalah perubahan tingkah laku peserta didik selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan perilaku itu mencakup ranah (domain) afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Djudju Sudjana (2000: 3-4). Hasil dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga belajar dalam mengelola usaha budidaya stroberi.

Dampak, adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 207). *Dampak Pembelajaran Partisipatif*, menurut Djudju Sudjana, (2000; 70) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari hasil belajar terhadap peri kehidupan peserta didik. *Dampak Pembelajaran Partisipatif* dalam pelatihan ini adalah sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari hasil pembelajaran terhadap peningkatan pendapatan, penerapan perolehan belajar (bekerja dan berusaha), upaya membelajarkan kepada keluarga dan tetangganya, ikut serta dalam kegiatan sosial baik kerja bakti atau menjaga keamanan lingkungan.

Faktor adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 273). Faktor dalam penelitian ini adalah hal yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup usaha budidaya tanaman stroberi.

Pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 246) adalah penyokong; pembantu; penunjang. Pendukung dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menunjang dan memperlancar dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup.

Penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:337) adalah membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat dalam penelitian ini adalah sesuatu yang mengganggu dan menghalangi dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya pembelajaran yang memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis termasuk perubahan sikap untuk bekerja maupun berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan. Program ketrampilan hidup ini memiliki cakupan yang luas berinteraksi antara pengetahuan dan ketrampilan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup mandiri (Broling, 1989) dalam Depdiknas, 2002).

Kelompok belajar, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat tani yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan (PP No.73/tahun 1991). *Kelompok tani giri saluyu*, adalah suatu wadah yang merupakan sekumpulan para petani usaha budidaya tanaman stroberi yang mengorganisir diri dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengamati dan mendeskripsikan penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup pada kelompok tani giri saluyu Desa Langensari.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengamati, mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan tentang:

1. Perencanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup
2. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup
3. Penilaian pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup
4. Hasil dan dampak pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup
5. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup

F. Kegunaan Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

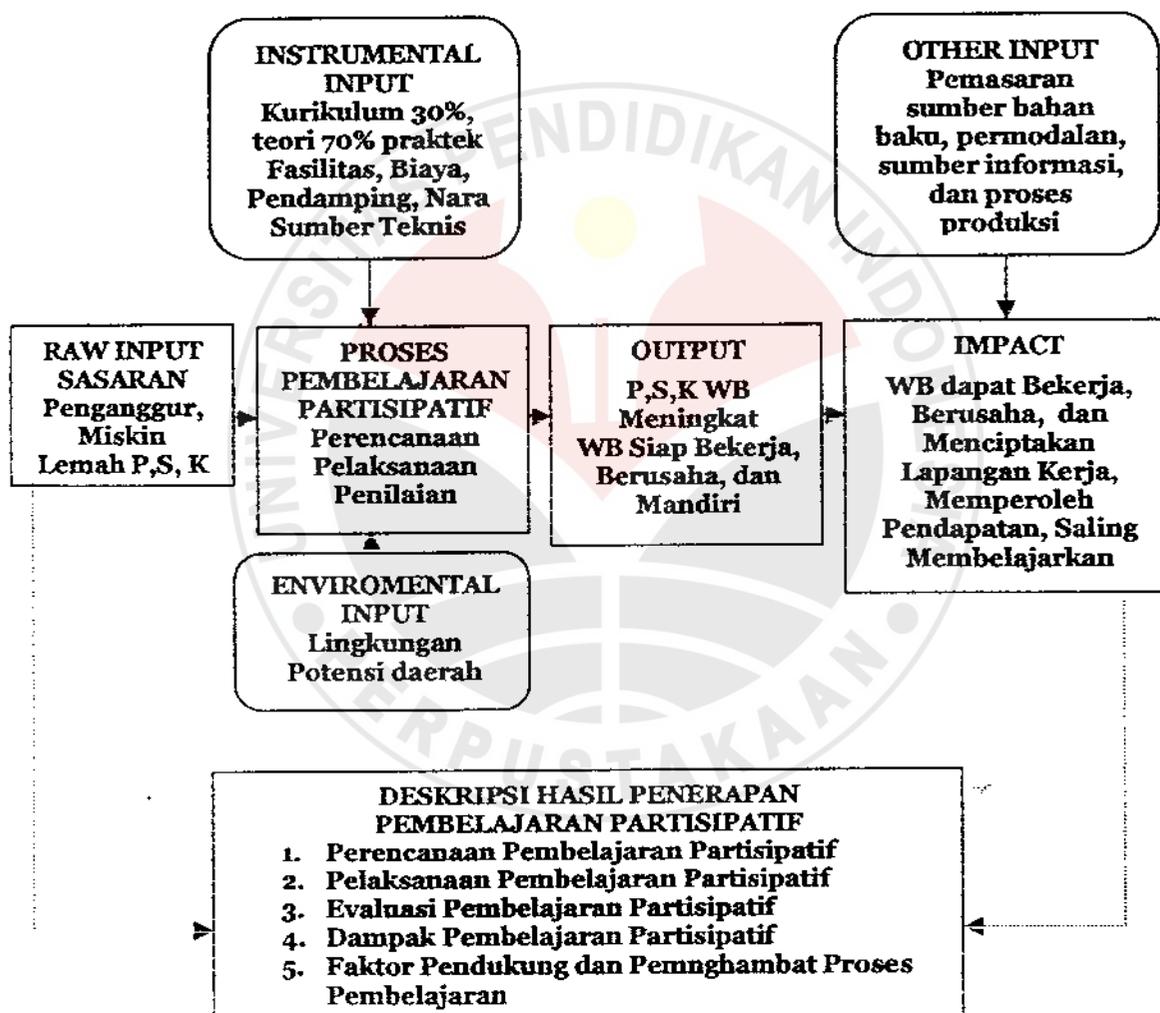
1. dari segi teoritis, hasil temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengkajian penerapan pembelajaran partisipatif khususnya yang dilaksanakan pada dalam pendidikan kecakapan hidup kelompok tani giri saluyu.
2. secara praktis, bagi pihak BPKB temuan ini dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan pembelajaran partisipatif untuk dalam pendidikan kecakapan hidup.
3. agar para pelaksana/praktisi pendidikan luar sekolah khususnya yang berada di SKB/UPTD memiliki gambaran praktis dan mudah dipahami dalam rangka

melaksanakan proses pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup dan dampaknya pada warga belajar.

4. bagi para peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian pengulangan maupun perluasan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penerapan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kecakapan hidup usaha budidaya stroberi adalah sebagai berikut.



Bagan 1.1. : Kerangka Pikir Penelitian Penerapan Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Kecakapan Hidup. Hasil modifikasi sistem pembelajaran pendidikan luar sekolah (Djudju Sudjana, 2001:34)



- a. (Raw Input), sasaran mencakup: 1) usia produktif (16-45 tahun) yang tidak bekerja, 2) warga masyarakat yang drop out SD/SLTP/SLTA, miskin, 4) mempunyai minat dan bakat untuk belajar keterampilan.
- b. (Instrumental Input), paket sistem instruksional, dalam rangka pendidikan kecakapan hidup mencakup: 1) adanya keterpaduan program dengan satuan pendidikan yang lain, sehingga program yang dilaksanakan tidak berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan dengan program lainnya; 2) adanya integrasi kurikulum yang digali dari program-program tersebut dan nilai-nilai/potensi yang ada di lokasi/daerah setempat.
- c. (Environmental Input) karakteristik lokasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, dengan kriteria lokasinya antara lain mencakup nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (sosial dan budaya), keadaan geografis, ekonomi dan sebagainya.
- d. Proses, metode pembelajaran digunakan secara variatif, pembelajaran melibatkan warga belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selain itu untuk membantu kemandirian warga belajar dilakukan fasilitasi pendampingan, pembelajaran dilakukan dengan mengoptimalkan potensi wilayah/mitra kerja yang ada dan terkait dalam pembelajaran kecakapan hidup.
- e. (Other Input), dalam rangka memberikan dukungan terhadap pembelajaran sistem instruksional keterampilan hidup, maka perlu dilaksanakan, pemodalannya, bantuan teknis, pemagangan dan kerjasama dengan mitra kerja secara terarah, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.
- f. (Output), warga belajar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga mereka siap bekerja, berusaha, mandiri dan siap bermitra.

g. (Out Come) Pada akhirnya pendidikan kecakapan hidup ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bekerja dan berusaha secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka memiliki pekerjaan atau sumber mata pencaharian yang tetap dan layak yang merupakan prasarat untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraannya.

Keberhasilan dalam pendidikan kecakapan hidup baik output dan impact sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga belajar dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Dengan melibatkan warga belajar, pembelajaran menjadi milik warga belajar, sehingga akan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan itu akan tercapai karena berasal dari kebutuhan dirinya, direncanakan dan dikerjakan oleh dirinya dan untuk keberhasilan dirinya.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran partisipatif adalah adanya sasaran, lingkungan, sarana dan prasarana serta faktor penghambat dan faktor pendukung proses pembelajaran. Dengan partisipasi warga belajar dalam menyatakan permasalahan, sumber penghambat dan pendukung, serta terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran akan berjalan efektif.

Oleh karena itu penerapan pembelajaran partisipatif baik strategi maupun metode dan teknik pembelajaran apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan mencapai tujuan dalam pendidikan kecakapan hidup yaitu warga belajar dapat bekerja, berusaha dan mandiri.